

PERINGATAN HAB KE-78 KEMENAG RI Digelar Doa Bersama untuk Palestina

MAGELANG (KR) - Beberapa kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Tahun 2024. Donor darah, pemberian bantuan kepada beberapa pihak dan doa bersama untuk perdamaian dunia juga dilaksanakan.

Demikian dikemukakan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Magelang HM Miftah, SAg MH kepada KR usai acara Apel Bendera peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 Kemenag RI Tahun 2024 yang dilaksanakan di MAN 1 Kabupaten Magelang yang ada di wilayah Karet Magelang, Rabu (3/1). Dikatakan, Kemenag Kabupaten Magelang juga membantu modal usaha bagi kaum dhuafa. Usai pelaksanaan Apel Bendera, juga dilakukan penyerahan secara simbolis kepada perwakilan penerima bantuan.

Dengan adanya bantuan ini, kata Miftah, diharapkan terjadi penurunan angka stunting. Kantor Kemenag Kabupaten Magelang memiliki Penyuluh Agama, dikerahkan ada di setiap desa. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang dimiliki 'pasukan' Penyuluh Agama yang non PNS tercatat 168 orang, yang P3K tercatat 36 orang dan 16 PNS. Juga diberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi, diantaranya guru berprestasi tingkat nasional, regional provinsi maupun Kabupaten Magelang. Juga diserahkan hasil beberapa kejuaraan atau lomba internal Kantor Kemenag Kabupaten Magelang dalam rangkaian peringatan HAB ke-78 Kemenag Tahun 2024. (Tha)-f



KR-Thoha

Kegiatan donor darah di MAN 1 Magelang.

PEMROV DAN DPRD JATENG SEPAKAT Pastikan Pembahasan Raperda Tetap Jalan

SEMARANG (KR) - Pemprov bersama DPRD Jateng memastikan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tetap jalan, meskipun sudah memasuki tahun politik elektoral. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, usai rapat paripurna Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2023/2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2023/2024 di Gedung Berlian Semarang, Selasa (2/1).

"Mengingat agenda pembahasan raperda yang menjadi kewajiban bersama antara DPRD dan eksekutif, ini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Apalagi raperda yang sifatnya luncuran," tutur Sumarno. Ia berharap meski saat ini sudah masuk tahapan kampanye pemilu 2024, kewajiban utama para legislator di DPRD tidak terganggu.

Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, di tahun-tahun terakhir masa tugas DPRD Jateng periode 2019-2024, meski diakui masih ada kekurangannya, akan dimaksimalkan di masa sidang kedua. "Bila ada kekurangan dalam rangka melayani masyarakat, membuat peraturan daerah, dan kebijakan-kebijakan yang belum diselesaikan, akan kami tingkatkan di masa sidang kedua," tegas Sumanto.

Meski saat ini sejumlah anggota DPRD Jateng sedang mempersiapkan Pemilu 2024, namun kegiatan-kegiatan yang sudah ditergetkan dalam rapat anggaran akan tetap dilaksanakan.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman menjelaskan, untuk mempercepat penyelesaian penyusunan Raperda yang telah disepakati dalam Propemperda 2024, maka pada masa persidangan kedua ini diharapkan dapat melaksanakan penyusunan, pembahasan, dan penyelesaian sejumlah Raperda.

Raperda yang saat ini dalam pembahasan panitia khusus (Pansus) meliputi Raperda inisiatif Gubernur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jateng tahun 2023-2043 dan Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu, dan bantuan di Provinsi Jateng. (Bdi)-f

300 Petugas Lipat Surat Suara Pemilu 2024

TEMANGGUNG (KR) - KPU Temanggung melibatkan sebanyak 300 petugas untuk sortir dan melipat surat suara yang akan dipergunakan pada Pemilu 2024. Ketua KPU Temanggung Henry Sofyan Rois mengatakan sortir dan pelipatan surat suara Pemilu 2024 dikerjakan di stadion tenis indor tempat logistik surat suara disimpan. "Kami rekrut warga sekitar untuk sortir dan pelipatan surat suara Pemilu 2024," kata Henry Sofyan Rois, Rabu (3/1).

Henry mengatakan petugas sortir dan pelipat itu terbagi dalam sejumlah kelompok yang masing-masing 10 orang dengan satu ketua. Ketua ini yang bertanggungjawab dalam sortir dan pelipatan. Henry menyampaikan sortir dilakukan dengan memeriksa lembar demi lembar surat suara, dengan memastikan tidak ada surat suara yang rusak dan tidak layak dipakai, seperti berlubang dan sobek, atau terdapat tinta yang menghalangi lambang partai atau nama. "Surat suara rusak dan tidak layak digunakan akan disendirikan, untuk dimusnahkan," katanya.

Henry mengatakan hasil sortir akan dilaporkan pada KPU RI untuk dimintakan ganti apabila ada kekurangan surat suara. Dikemukakan tiap 10 lembar surat suara akan dibendel. Untuk satu dos sendiri berisi 500 surat suara. "Nanti akan dihitung ulang untuk memastikan tidak ada yang kurang," katanya. Disampaikan Henry Sofyan pada sortir dan pelipatan ini untuk 2 surat suara yakni DPRD Provinsi Dapil Jateng 9 dan DPR RI Dapil Jateng 6. "Kami target empat hari selesai. Insyaallah selesai," kata dia. Surat suara akan kembali datang pada tanggal 10 dan 12 Januari mendatang yang terdiri surat suara untuk presiden, DPD dan DPRD kabupaten. Dia mengatakan petugas diperiksa sewaktu masuk dan keluar dari ruang sortir dan pelipatan, jangan sampai ada surat suara keluar atau ada surat suara lain yang masuk ke dalam ruangan. (Osy)-f

DPRD Grobogan Bentuk Pansus Raperda Perlindungan Lahan Pertanian



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Pembentukan Pansus dilakukan pada rapat paripurna ke-49, Kamis pekan lalu. Pansus terdiri 15 anggota berasal dari tujuh fraksi yang ada, diketuai Hj Lusia Indah Artani SE MM.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto SSos MAP, menerangkan materi Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan telah disampaikan Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM kepada DPRD dalam rapat paripurna Dewan ke-46 pada tanggal 18 Desember 2023. Kemudian telah ditanggapi oleh Dewan dalam bentuk Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam rapat paripurna ke-47, tanggal 12 Desember 2023.

Dalam rapat paripurna tersebut, ketujuh fraksi telah menyampaikan saran, pen-

dapat, pertanyaan, maupun permintaan penjelasan berkaitan dengan materi raperda dimaksud, yang harus ditanggapi atau dijawab oleh Bupati dalam forumrapat paripurna. Bupati sendiri sudah menjawab pemandangan umum ketujuh fraksi.

"Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan, maka diperlukan forum pembicaraan lebih lanjut melalui Alat Kelengkapan Dewan yang ditunjuk untuk membahas Raperda dimaksud yaitu Panitia Khusus," terang Agus. Namun demikian, lanjut politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Gubug ini, keputusan tertinggi ada pada anggota Dewan.

"Kita serahkan pembahasannya kepada Panitia Khusus, apakah dapat disetujui," tanya Agus. Secara serentak seluruh anggota Dewan menyatakan setuju. "Untuk itu kita tetapkan menjadi Pansus VIII Tahun 2023, dengan tugas mem-

bahas Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya, kepada Pansus VIII Tahun 2023 yang diketuai Ibu Hj Lusia Indah Artani SE MM kami ucapkan selamat bekerja dan kami minta untuk dapat menggunakan waktu secara optimal dalam pembahasannya," pintanya. Sebelumnya, Bupati Grobogan menjelaskan, salah satu tujuan disusunnya Raperda Perlindungan Lahan Bekerja dan kami minta untuk dapat menggunakan waktu secara optimal dalam pembahasannya," pintanya. Sebelumnya, Bupati Grobogan menjelaskan, salah satu tujuan disusunnya Raperda Perlindungan Lahan Bekerja dan kami minta untuk dapat menggunakan waktu secara optimal dalam pembahasannya," pintanya. Sebelumnya, Bupati Grobogan menjelaskan, salah satu tujuan disusunnya Raperda Perlindungan Lahan Bekerja dan kami minta untuk dapat menggunakan waktu secara optimal dalam pembahasannya," pintanya.

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Grobogan sebanyak 1.501.145 orang pada tahun 2022. Adapun kebutuhan pangan yang dalam hal ini beras sebanyak 114,6 kilogram/kapita/tahun, atau sekitar 172.031 ton untuk seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan.

"Berdasarkan data tersebut, maka seharusnya produksi padi yang dihasilkan sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Grobogan. Dengan demikian kemandirian pangan di Kabupaten Grobogan sebagaimana kita hara-

pkanbersama dapat terwujud," tandasnya.

Diakuinya, sampai saat ini belum ada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Grobogan. Setelah ada lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pihaknya akan segera menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat dan pihak terkait dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Tas)-f



KR-M Taslim

DPRD Grobogan membentuk pansus Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Kampanye Berknalpot Brong Ditindak Tegas

SEMARANG (KR) - Penggunaan knalpot brong atau tanpa sarangan dengan tujuan agar suaranya keras hingga memekakkan telinga, dilarang di jalan raya.

Bahkan petugas Polisi Lalu Lintas akan tegas melarang termasuk saat digunakan untuk kampanye atau aktifitas berkendara massal di jalan raya.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Sonny Irawan SIK MH, menegaskan larangan penggunaan knalpot brong. Bahkan dirinya menegaskan bahwa wilayah hukum Polda Jateng 'Zero Knalpot Brong'. Menurutnya, aturannya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Pasal 285 Ayat 1 UULAJ. Ancamannya pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Oleh karena itu, untuk menegakkan undang-undang dan memberi rasa nyaman serta aman terhadap masyarakat pengguna jalan, Dirlantas Polda Jateng mengimbau kepada ma-

sarakat agar tidak melakukan pelanggaran di jalan raya, terutama menggunakan knalpot yang tidak standart.

"Knalpot brong sudah lama dilarang digunakan di jalan raya karena bisa mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Oleh karena itu kami akan melakukan tindakan tegas sesuai UULAJ," ungkap Kombes Pol Sonny Irawan SIK MH.

Terpisah Polres Sukoharjo juga telah melakukan himbauan kepada masyarakat akan larangan penggunaan knalpot brong atau tidak sesuai standart. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit SIK MH secara tegas melarang Knalpot Brong digunakan di jalan raya wilayah Sukoharjo.

"Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk semua," tegasnya, Rabu (3/1).

Zainal Petir, Mantan Wakil Ketua Komisioner Informasi Publik Jateng di Semarang menyoreti kasus penggunaan knalpot brong mencuat setelah adanya sekelompok massa yang memblayer-blayer knalpot brong di depan Markas Tentara di Boyolali dan mendapat tindakan hingga berbuntut penganiayaan terhadap mereka.

"Saya rasa ini dampak dari suatu tindakan yang sudah dianggap mengganggu kenyamanan. Tindakan penganiayaan tentu tidak bisa dibenarkan, namun saya kira itu juga tidak secara tiba-tiba terjadi penganiayaan. Tentu ada proses, apakah karena tidak mempan diperingatkan secara persuasif baru terjadi penganiayaan. Oleh karena itu kedua belah pihak harus bisa sama-sama menyadari kesalahan masing-masing. Andai tidak ada yang menggunakan knalpot brong dan memblayer-blayer di depan markas tentara, mungkin hal itu tak akan terjadi. Jadi sekali lagi harus saling menyadari, karena penggunaan knalpot brong sesungguhnya merupakan pelanggaran UU-LAJ," ungkap Zaenal Petir.

Petir mengingatkan agar kasus ini tidak digoreng menjadi isu yang akan mempengaruhi jalannya Pemilu 2024. "Apalagi ditarik-tarik untuk menjatuhkan lawan politik dan menaikkan dukungan pasangan Pilpres tertentu. Ini bahaya, akan berpotensi memecah belah. Hal-hal yang bisa dijadikan muatan provokasi harus dihindari," tegas Petir.

Media juga diharapkan tidak memberi ruang terhadap berita kasus ini untuk menjadikan semakin panas. "Silahkan kalau untuk mengawal kasus penanganannya, namun jangan sampai memanas-manas dengan berita yang tak berimbang. Namun yang lebih penting media harus ikut menyosialisasikan UULAJ khususnya tentang Pelarangan Knalpot Brong, agar masyarakat sadar dan tahu itu pelanggaran, sehingga tidak ada nada yang merasa terganggu," ungkap Zainal Petir. (Cha)-f

Remaja Tentukan Masyarakat Demokratis

MAGELANG (KR) - SMA Tarakanita Magelang menggelar ceramah umum dengan tema 'Suara Remaja dalam Menentukan Masyarakat Demokratis' sebagai pembuka Pembelajaran P5. Acara berlangsung pada Rabu (3/1) di Gedung A SMA Tarakanita Magelang.

Nara sumber pada acara tersebut adalah I Gusti Nyoman Yonathan Wiradi SH MKn, dosen dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Ceramah diikuti 82 siswa Fase F SMA Tarakanita ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya peran mereka dalam

membangun masyarakat demokratis. Dalam ceramahnya, I Gusti Nyoman Yonathan Wiradi menyampaikan berbagai konsep dasar demokrasi dan menjelaskan bagaimana suara remaja dapat menjadi kekuatan positif dalam proses demokratisasi.

Yonathan menekankan bahwa partisipasi aktif generasi muda, terutama dalam pemilihan umum, adalah kunci utama menuju masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Selain membahas konsep dasar demokrasi, dosen Unika Soegijapranata Semarang tersebut juga memberikan penjelasan mendalam tentang proses pemilihan

umum dan pentingnya melibatkan diri dalam pengambilan keputusan politik. Para siswa diajak untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang berperan aktif dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

"Suara remaja adalah elemen penting dalam menentukan arah dan nilai-nilai masyarakat demokratis. Melalui partisipasi aktif dalam proses demokratisasi, kalian memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik," ungkap Yonathan.

Acara tersebut merupakan langkah awal dalam rangkaian kegiatan Pembelajaran P5 Tema Suara

Demokrasi di SMA Tarakanita Magelang. Harapannya, pemahaman yang diberikan melalui ceramah ini dapat menjadi dasar ba-

gi para siswa untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam membangun masyarakat. (Hrd)-f



KR-Istimewa

Kegiatan ceramah umum di SMA Tarakanita Magelang.

LPS Rehabilitasi Ekosistem Mangrove Cilacap

CILACAP (KR) - Menjalankan misi pelestarian lingkungan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) baru-baru ini melaksanakan Kegiatan Sosial Masyarakat (KSK) uji coba dan penca-

nangan rehabilitasi ekosistem mangrove di Nusa Bantarjoji, Kawasan Segara Anak Cilacap Jawa Tengah, bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB Univer-

sity.

"Pada area tersebut akan ditanami 10.000 bibit mangrove dengan pola tanam murni, dipadukan silvofishery atau sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan usaha perikanan dengan penanaman mangrove," ujar Kepala Kantor Program Restrukturisasi Perbankan dan Hubungan Lembaga LPS Hermawan Setyo Wibowo, Rabu (3/1).

Menurut Hermawan, ini merupakan kegiatan jangka panjang untuk melaksanakan rehabilitasi lingkungan di Nusa Bantarjoji. Pada tahap pertama dilaksanakan uji coba dan penanaman pada area seluas 1 hek-

tare. Nantinya, total luas lahan yang dipersiapkan dan dibersihkan sebesar 135,7 hektare. Rinciannya, Nusa Bantarjoji seluas 43,7 hektare dan Nusa Alasanom 92 hektare.

Dalam berbagai kesempatan KSK, LPS terus mensosialisasikan peran dan fungsinya kepada masyarakat, untuk menjamin seluruh dana simpanan nasabah perbankan di Indonesia sampai Rp 2 miliar pernasabah perbankan dengan syarat tercatat dalam pembukuan bank, tingkat suku bunga sesuai atau tidak melebihi tingkat suku bunga LPS, dan tidak terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perbankan. (San)-f



KR-Istimewa

Uji coba penanaman mangrove di Cilacap.